

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**RAPAT KOORDINASI GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DENGAN BUPATI/WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TANGGAL 16 s.d 17 JANUARI 2019
DI MANGGAR, KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**RAPAT KOORDINASI GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DENGAN BUPATI/WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TANGGAL 16 s.d 17 JANUARI 2019
DI MANGGAR, KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
B. DASAR PELAKSANAAN	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN	5
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	6
E. WAKTU DAN TEMPAT	6
F. TEMA PELAKSANAAN	7
G. MATERI PEMBAHASAN	7
H. NARASUMBER DAN PESERTA	12
I. PEMBIAYAAN	16
J. PENUTUP	16
K. LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1. LAMPIRAN I	: MATERI RAPAT	
2. LAMPIRAN II	: SAMBUTAN	
3. LAMPIRAN III	: NOTA DINAS ACARA	
4. LAMPIRAN IV	: ADMINISTRASI SURAT	
5. LAMPIRAN V	: DAFTAR PESERTA	
6. LAMPIRAN VI	: JADWAL	
7. LAMPIRAN VII	: HASIL KESEPAKATAN	
8. LAMPIRAN VIII	: DOKUMENTASI	
9. LAMPIRAN IX	: SK TIM KEGIATAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta hidayahNYA sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Januari 2019 di Manggar Kabupaten Belitung Timur dapat diselesaikan.

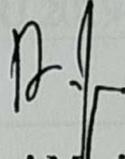
Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wadah untuk mencari solusi atas isu strategis atau kendala yang dihadapi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kemudian dicapai kesepakatan bersama antara Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota terhadap permasalahan strategis yang sedang dihadapi.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah bekerja sama mensukseskan kegiatan ini. Kepada Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, seluruh pejabat dan staf penyelenggara pada Biro Pemerintahan dan Humas Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dan Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

Kami menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami sangat membutuhkan saran dan masukan untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Pangkalpinang, 31 Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Dwi Mariska, S.IP

NIP. 19780302 200212 2 006

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN BUPATI/WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2019
MANGGAR, 16 - 17 JANUARI 2019**

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya dengan menganut demokrasi yang memiliki asas kesamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin, dapat memimpin apabila dipilih oleh rakyat.

Dalam era demokrasi, pemilu merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemimpin melahirkan pemimpin dan partai politik yang mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus menjadi saringan terhadap politisi berdasarkan preferensi tertentu dari pemilih, termasuk integritasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mewujudkan pemimpin yang berintegritas. Pada pemilu tahun 2004, proses pemilihan telah mengalami perubahan yang cukup berarti. Presiden tidak lagi dipilih oleh anggota MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini berarti adanya pergeseran kedaulatan politik dari partai politik kepada rakyat secara langsung yang memberikan suaranya dalam menentukan siapa yang dianggap layak menjadi pemimpin.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rutin melaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mensinergikan kebijakan demi tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mensejahterakan masyarakat.

Pada Tahun 2019, Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung membahas 10 isu strategis yang sedang berkembang, yaitu:

1. Rencana Pembangunan 2020 dan Aplikasi SIMDA;
2. Penggunaan Sampah Plastik dan TPASR;
3. Pembanguna Infrastruktur;

4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
5. Tata Kelola Batas Wilayah;
6. Pembangunan Perkebunan Lada;
7. Pariwisata dan Penetapan Kalender Event;
8. Pembangunan Pelabuhan (dermaga);
9. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
10. Kabupaten Layak Anak.

Pembahasan isu-isu strategis tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tercapai kesepakatan yang kemudian di bahas kembali pada Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A).
9. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/06/I/2019 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/002/I/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Maksud

Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kerja sama antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membahas dan mencari solusi permasalahan terkait rencana kerja sama pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Tujuan

Tujuan Rapat Koordinasi ini adalah menyamakan persepsi, mencari solusi atas isu strategis/kendala yang di hadapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pembangunan.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersusun dan terlaksananya kesepakatan antara Gubernur, Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait isu-isu yang di bahas dalam pelaksanaan Rakor Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota dilaksanakan di Kantor Bupati Belitung Timur dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Teknis Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB s.d selesai;
2. Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 10.00 WIB s.d selesai.

F. TEMA PELAKSANAAN

**SINERGITAS DALAM RANGKA Mendukung Potensi Unggulan
Melalui Pembangunan Berkelanjutan**

G. MATERI PEMBAHASAN

1. Penerapan Simda BPKP;
2. Fokus Rencana Pembangunan 2020;
3. Pengelolaan Sampah Plastik dan TPS3R;
4. Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi dan Tata Ruang;
5. Pembangunan Pemukiman;
6. Tata Kelola Batas Daerah/Wilayah;
7. Pembangunan lada berkesinambungan;
8. Pariwisata - Kalender Event;
9. Perhubungan - Pembangunan Dermaga;
10. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
11. Kabupaten Layak Anak.

Pokok bahasan tersebut dibahas pada Rakor Teknis pada tanggal 16 Januari 2018 dan terbagi dalam 10 Desk, yaitu:

a. Desk I, membahas Penerapan Simda BPKP dan Fokus Pembangunan 2020 dengan peserta yaitu:

1. Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bakuda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Desk II, membahas Pengelolaan Sampah Plastik dan TPS3R dengan peserta yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota se/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Desk III, membahas Pembangunan Infrastruktur dengan peserta yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota se/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Desk IV, membahas Pembangunan Permukiman dengan peserta yaitu:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota se/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e. Desk V, membahas Tata Kelola Batas Daerah/Wilayah dengan peserta yaitu:

1. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

f. Desk VI, membahas Pembangunan Lada Berkesinambungan dengan peserta yaitu:

1. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

g. Desk VII, membahas Pariwisata dengan peserta yaitu:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

h. Desk VIII, membahas Perhubungan dengan peserta yaitu:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

i. Desk IX, membahas Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu dengan peserta, yaitu:

1. Dirlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Cabang Jasa Raharja;
4. Kepala Cabang Bank Sumselbabel;
5. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang;
6. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka;
7. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
8. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
9. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
10. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung;
11. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
12. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

j. Desk IX, membahas Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu dengan peserta, yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang;
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah;

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Selatan;
7. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat;
9. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

H. NARASUMBER DAN PESERTA

Narasumber pada Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, adalah:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bupati Bangka;
3. Bupati Belitung;
4. Bupati Belitung Timur;
5. Bupati Bangka Selatan;
6. Bupati Bangka Tengah;

7. Bupati Bangka Barat;

8. Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peserta pada Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, adalah:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

2. Bupati Bangka;

3. Bupati Belitung;

4. Bupati Belitung Timur;

5. Bupati Bangka Selatan;

6. Bupati Bangka Tengah;

7. Bupati Bangka Barat;

8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

9. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

10. Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

11. Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

12. Bakuda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

13. Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

14. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

15. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

18. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

19. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota se/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
23. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
24. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
25. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
26. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
27. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
28. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
29. Dirlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung;
30. Kepala Cabang Jasa Raharja;
31. Kepala Cabang Bank Sumselbabel;
32. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang;
33. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka;
34. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
35. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

36. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
37. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung;
38. Kepala UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
39. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang;
40. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah;
41. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka;
42. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung;
43. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Selatan;
44. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur;
45. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat.

I. PEMBIAYAAN

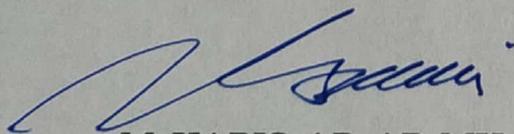
Biaya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

J. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 sebagai salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

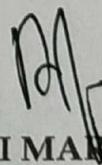
Pangkalpinang, 31 Januari 2019

Mengetahui
Kepala Biro Pemerintahan,



M. HARIS, AR, AP, MH
NIP. 19760620 199502 1 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DWI MARISKA, S.IP
NIP. 19780302 200212 2 006



KESEPAKATAN
GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
HASIL RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-01-2019) bertempat di Manggar (Ruang Rapat Satu Hari Bangun Negeri) Kabupaten Belitung Timur, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang didahului dengan Rapat Teknis Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota pada tanggal 16-01-2019, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergitas perencanaan dalam mendukung program-program strategis Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Tahun 2020, melalui berbagai sumber pendanaan;
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menggunakan Aplikasi SIMDA dan BPKP, bersinergi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SIMDA guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Mengaktifkan kembali TPS 3R yang sudah terbangun serta menyusun regulasi pembatasan timbulan sampah plastik serta menyusun Perda tentang pengelolaan sampah plastik;
4. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat Desa Jelutung oleh Kabupaten Bangka tengah terkait lokasi TPA Regional yang telah ditetapkan, serta mengusulkan lokasi alternatif di Desa Puding Besar yang terakomodir dalam RTRW di Kabupaten Bangka.
5. TPA Regional di Pulau Belitung di usulkan di perbatasan Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur di Desa Ibul Kecamatan Badau dan Dusun Pelulusan Desa Nyuruk Kecamatan Dendang;
6. Kota Pangkalpinang setuju menyerahkan TPA Parit Enam ke Pemerintah Provinsi setelah TPA regional selesai dikerjakan dan Pemerintah Provinsi akan membiayai transportasi/BBM menuju TPA regional;
7. Melakukan peningkatan status jalan kabupaten/kota ke jalan provinsi dan jalan provinsi ke jalan nasional serta mengidentifikasi ruas jalan pada kawasan hutan berikut pemberian ganti layak dengan data terlampir;
8. Mengoptimalkan pengelolaan, sinergitas serta penyediaan lahan untuk peningkatan kualitas sumber daya air dengan data terlampir;
9. Memanfaatkan ruang di sempadan pantai yang berkelanjutan berbasis kemasyarakatan dengan mempercepat penyelesaian dan penetapan Daerah Penting Cakupan Luas dan Strategis (DPCLS) dengan data terlampir;
10. Pencapaian program 100 – 0 – 100 (air minum, kumuh, dan sanitasi) di Tahun 2020 dengan dukungan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan data terlampir;
11. Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Penegasan Batas Daerah TA 2019 diselesaikan sebelum bulan Juni tahun 2019 dengan data terlampir;

12. Pemerintah Kabupaten/Kota menggabungkan kegiatan untuk memfasilitasi penyesuaian administrasi pemerintahan (kependudukan, pertanahan & perizinan) dan penyesuaian data administrasi kewilayahan pasca penegasan batas daerah;
13. Pengusulan revisi Permendagri Batas Daerah wajib mempersiapkan data pendukung dan bukti-bukti empiris maksimal 6 (enam) bulan sudah harus terselesaikan;
14. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan meningkatkan kompetensi dibidang pemetaan bagi ASN Kabupaten/Kota melalui pengiriman peserta diklat/bimtek ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dan berkomitmen untuk tidak melakukan mutasi personil pemetaan tersebut minimal 5 (lima) tahun setelah selesai mengikuti diklat/bimtek (penyampaian nama peserta maksimal tanggal 28 Februari 2019);
15. Peningkatan produksi dan kualitas lada melalui penyediaan bibit unggul bersertifikat dan penggunaan teknologi tepat guna menjadi kewajiban Provinsi, untuk pupuk, pengendalian hama penyakit dan tajar hidup berbagi dengan Provinsi dan Kabupaten penerima;
16. Pemantapan data CPCL lada dilakukan oleh Provinsi melalui aplikasi SAHANGKU dan diserahkan ke Kabupaten/Kota;
17. Pemerintah Provinsi memiliki target penanaman lada yang dilaksanakan mulai pada bulan April 2019 dengan tahapan yang telah disepakati, jika waktu yang telah disepakati tidak dilaksanakan maka pengadaan bibit di tunda;
18. Identifikasi CPCL Program Replanting Kelapa Sawit akan difasilitasi oleh Kabupaten;
19. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi tanaman sawit yang tidak standar dengan hasil DPCLS terdaftar, data DPCLS dapat diselesaikan paling akhir bulan Agustus 2019;
20. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat untuk menyelenggarakan event Pariwisata melalui *Cost Sharing*, yaitu:

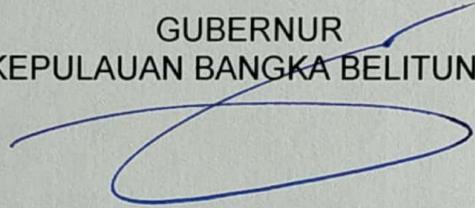
No	Kabupaten/Kota	Nama Event
1.	Pangkalpinang	a. Festival Cheng Beng
		b. Pangkalpinang Fair & Carnival Fiest
2.	Bangka	a. Sungailiat Sport Tourism
		b. Festival Kemuja
3.	Bangka Tengah	a. Festival Ketawai
		b. Sport Tourism
4.	Bangka Selatan	a. Toboali City on Fire
		b. Nyelanding Cross
5.	Bangka Barat	a. Sarasehan Sejarah
		b. Festival Jiran Nusantara
6.	Belitung	a. Pesona Belitung Beach Festival
		b. Festival Tanjung Kelayang
		c. Festival Geopark
7.	Belitung Timur	a. Belitung Timur Fashion Carnaval
		b. Stoven Jazz Open Pit
		c. Festival Geopark

21. Melakukan promosi pariwisata bersama diluar daerah dan melalui maskapai penerbangan dengan membuka route baru Bali–Bangka–Belitung–Bali, Surabaya–Bangka–Belitung–Surabaya dan Tanjung Pandan-Singapore;
22. Melaksanakan launching 16 event pariwisata di Kementerian Pariwisata;
23. Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyiapkan lahan dan akses jalan lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan;
24. Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyiapkan data Dukung: FS, RIP, SID/DED, Dokumen Lingkungan dan Dokumen Andalalin khusus untuk rencana pelabuhan dan pembangunan jembatan Laskar Pelangi di Juru Seberang Kabupaten Belitung;
25. Pemerintah Provinsi akan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
26. Hanya kendaraan menggunakan Plat hitam yang dapat terakomodir ke aplikasi Bukalapak, pada Triwulan II melaksanakan komitmen dan Pelaksanaannya di Triwulan III;
27. Akan dilaksanakan pembuatan API (*Application Programming Interface*) untuk mendukung program E-Samsat;
28. Bukalapak akan melakukan riset atas KYC untuk fitur registrasi dan identifikasi E-Samsat;
29. Pemerintah Provinsi mendorong penyamaan Nomenklatur Dinas yang membidangi Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota dan menyusun Perda Perlindungan Anak bagi yang belum serta mendukung percepatan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak;
30. Pemerintah Provinsi mendorong penyamaan Nomenklatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota;
31. Pengembangan infrastruktur jalan untuk mendukung kawasan pariwisata.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dibuat di : Manggar
Pada tanggal tersebut diatas.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



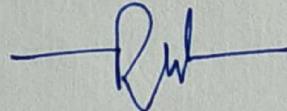
Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

BUPATI
BELITUNG,



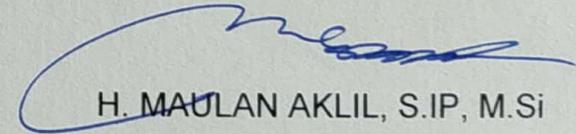
H. SAHANI SALÉH, S.Sos

Pih. SEKRETARIS DAERAH
BANGKA SELATAN,



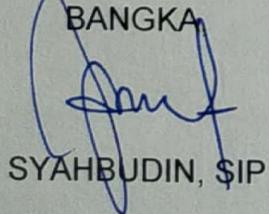
AGUS PRATOMO, SE, MM

WALIKOTA
PANGKALPINANG,



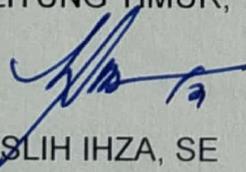
H. MAULAN AKLIL, S.IP, M.Si

WAKIL BUPATI
BANGKA



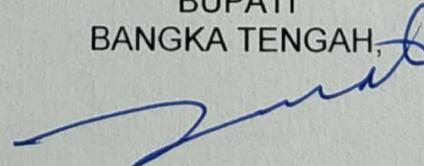
SYAHBUDIN, SIP

BUPATI
BELITUNG TIMUR,



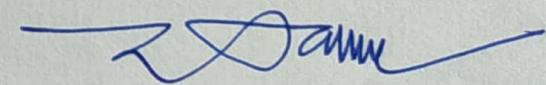
YUSLIH IHZA, SE

BUPATI
BANGKA TENGAH,



Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM

SEKRETARIS DAERAH
BANGKA BARAT,



Drs. H. YUNAN HELMI, M.Si